

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang.¹ Pada dasarnya pembangunan ekonomi bertujuan untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, terciptanya lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan ekonomi nasional sebagai upaya untuk membangun seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum, seperti yang tersurat pada alinea IV Pembukaan UUD 1945. Pembangunan sebagai salah satu cermin pengamalan Pancasila terutama dijiwai sila kelima, *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia* yaitu upaya peningkatan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada tercapainya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.²

Disisi lain, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih mengalami proses pembangunan ekonomi yang memiliki tujuan untuk mencapai tujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan salah satunya dibutuhkan kesempatan kerja yang mendukung dan adanya pemerataan pendapatan di

¹ Nur Ravika Famala Sari, "Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Timur Tahun 2010-2014", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.1, No. 1 (Juni, 2016), hlm. 72.

² Muhammad Nurcholis, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol. 12. No.1 (Juni, 2014), hlm. 46.

masyarakat. Pembangunan ekonomi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian, salah satu diantaranya dari tingkat pengangguran. Melalui tingkat pengangguran kita dapat melihat tingkat kesejahteraan masyarakat serta tingkat distribusi pendapatan.

Pengangguran merupakan suatu masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat.³ Pengangguran erat kaitannya dengan perkembangan penduduk dan kesempatan kerja, jika kedua hal tersebut tidak disiasati dengan tepat maka munculah berbagai dampak yang bersifat negatif, baik terhadap kestabilan ekonomi maupun terhadap kestabilan sosial dan politik.⁴

Pengangguran terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang disebabkan karena rendahnya pertumbuhan penciptaan lapangan kerja. Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang saat ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan. Jumlah penganggur mengalami peningkatan. Sebaliknya pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, dapat menjadi beban masalah keluarga dan masyarakat sumber utama kemiskinan, dapat mendorong meningkatnya keresahan sosial dan kriminalitas serta dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Meningkatnya angka pengangguran disebabkan karena ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja.

Adanya kesenjangan antara angkatan kerja dan lapangan kerja tersebut akan berdampak terhadap perpindahan tenaga kerja (migrasi) baik secara spasial

³ N Gregory Mankiw, *Makroekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 154.

⁴ Asfia Murni, *Ekonomi Makro* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm. 197.

antara desa-kota maupun secara sektoral. Hal ini sejalan dengan terjadinya perpindahan penduduk disebabkan oleh tingginya upah atau pendapatan yang dapat diperoleh di daerah tujuan. Kesenjangan upah atau pendapatan yang besar antara desa atau kota mendorong penduduk desa atau daerah untuk datang dan mencari pekerjaan di kota.

Kesempatan kerja yang tinggi akan mempengaruhi masyarakat untuk bekerja dengan begitu kemiskinan akan mengalami penurunan, pendapatan masyarakat menjadi lebih baik untuk mencapai kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Masalah pengangguran merupakan hal yang krusial dalam perekonomian negeri ini lebih spesifiknya pendapatan nasional Indonesia.⁵ Untuk mengetahui kenapa pengangguran menjadi hal yang krusial maka disajikanlah data tingkat pengangguran terbuka di Indonesia, yakni:

Gambar 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia
Tahun 2014-2018 (persen)



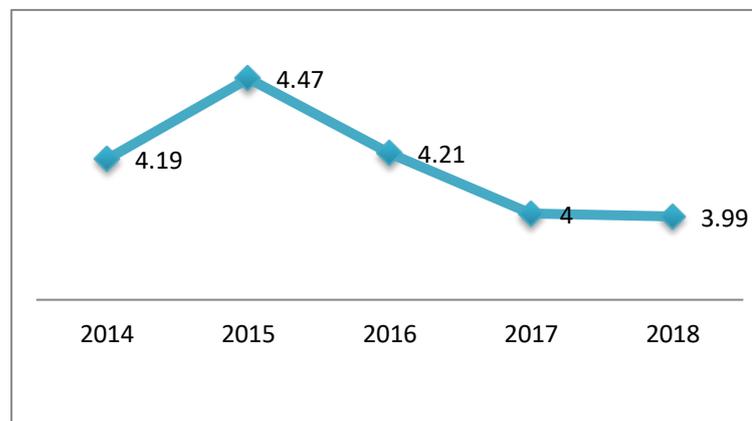
Sumber: BPS Pusat 2019

Dalam tahun 2014-2018 pengangguran di Indonesia mengalami fluktuasi. Terlihat pada data yang ada puncak tertinggi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia terjadi pada tahun 2015 sebesar 6,18%. Pada tahun 2016-2018 terjadi

⁵ Naf'an, *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 131.

penurunan tingkat pengangguran terbuka seperti gambar diatas. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah pusat yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah mampu menekan laju tingkat pengangguran yang juga diiringi dengan meningkatnya infrastruktur untuk pembangunan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi, tetap saja pengangguran seakan menjadi momok masalah nasional yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah dan pusat yang harus segera diatasi setiap tahunnya. Tingkat pengangguran secara nasional pasti mempengaruhi tingkat pengangguran di wilayah tertentu di Indonesia. Seperti yang dilihat pada gambar 1.2 mengenai tingkat pengangguran terbuka pada Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2018.

Gambar 1.2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014-2018 (persen)



Sumber: BPS Pusat 2019

Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka yang masih bisa ditekan laju pertumbuhannya. Pada tahun 2015 pada tingkat pengangguran tertinggi Provinsi Jawa Timur yaitu 4,47% dan sampai pada tahun 2018 terus mengalami penurunan angka pengangguran. Hal ini sejalan dengan tingkat pengangguran terbuka secara nasional yang juga mengalami puncaknya pada tahun 2015 sedangkan pada tahun 2016-2018 mengalami

penurunan. Akan tetapi, informasi berdasar Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka normal di suatu wilayah adalah tidak lebih dari 4%.⁶ Sehingga bisa dikatakan pada jangka waktu ini tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur berada pada kondisi normal. Tingkat pengangguran terbuka yang menurun dapat menjadi acuan pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun yang akan datang. Jika dilihat perbandingan antara DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali, maka Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat pengangguran terbesar. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Perbandingan Antara Rasio Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali
Tahun 2014-2018 (persen)

Wilayah	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Nasional	5.94	6.18	5.61	5.50	5.34
DI Yogyakarta	3.33	4.07	2.72	3.02	3.35
Jawa Timur	4.19	4.47	4.21	4.00	3.99
Bali	1.90	1.99	1.89	1.48	1.37

Sumber: BPS Pusat 2019

Terlihat pada tabel tersebut bahwa tingkat pengangguran Provinsi Jawa Timur berada di bawah tingkat pengangguran nasional, sehingga hal ini berarti secara nasional Provinsi Jawa Timur sudah mampu menekan laju pengangguran. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Bali, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur dinilai tinggi. Hal ini

⁶ Nur Ravika Famala Sari, "Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Timur Tahun 2010-2014", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.1, No. 1 (Juni, 2016), hlm. 73.

menunjukkan tingginya tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur. Sehingga hal tersebut menuntut pemerintah dapat menekan ataupun mengurangi tingkat pengangguran. Disamping itu, tingginya tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur menunjukkan terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya salah satunya adalah variabel makroekonomi seperti indeks pembangunan manusia, upah minimum kabupaten/kota, dan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu variabel makroekonomi yang memengaruhi tingkat pengangguran adalah indeks pembangunan manusia. Tingginya pertumbuhan penduduk apabila tidak disertai dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka mereka tidak mampu menempati lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah tersebut. Kualitas sumber daya manusia dapat diukur melalui besarnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran dan pada akhirnya akan tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa dengan pembangunan manusia yang diukur melalui besarnya nilai IPM akan berdampak pada tinggi rendahnya tingkat pengangguran di suatu wilayah.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhinya adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Kaufman dan Hotchkis dalam Alghofari dijelaskan bahwa

⁷ Dwi Mahroji dan Iin Nurkhasanah, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten" *Jurnal Ilmu Ekonomi*, No. 1 Vol. 9 (April, 2019), hlm. 57.

semakin tinggi upah yang ditetapkan akan membawa pengaruh pada tingginya tingkat pengangguran yang terjadi.⁸ Hal ini bisa terjadi karena dengan semakin tinggi upah yang ditetapkan maka akan berpengaruh pada peningkatan biaya *output* yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Akibatnya suatu perusahaan akan melakukan efisiensi terhadap produk dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerjanya, maka akan terjadi peningkatan pengangguran.

Variabel makroekonomi selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi. Masalah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengangguran suatu wilayah. Bila pendapatan wilayah tersebut berkurang maka, jumlah pengangguran bertambah atau meningkat. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menurun. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat pengangguran menurun.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur masih mengalami perubahan setiap tahunnya. Atas dasar penjelasan tersebut perlu dilakukan penelitian mengenai masalah pengangguran di Provinsi Jawa Timur. Maka dari adanya masalah-masalah diatas penulis mengambil judul "**Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2018**".

B. Rumusan Masalah

Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia, tingkat upah minimum

⁸ Trianggono Budi Hartanto dan Siti Umajah M, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Jumlah Pengangguran di Kabuapten dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014" *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, No. 2 (Juni, 2017), hlm. 2.

kabupaten, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dengan mengambil studi kasus di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh variabel makroekonomi terhadap pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018 secara parsial ?
2. Apakah ada pengaruh variabel makroekonomi terhadap pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018 secara simultan ?
3. Seberapa besar kontribusi variabel makroekonomi terhadap pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel makroekonomi terhadap pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018 secara parsial.
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel makroekonomi terhadap pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018 secara simultan.
3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel makroekonomi terhadap pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan informasi kepada masyarakat sekitar dalam masalah pengangguran yang terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

2. Bagi lembaga terkait

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi dan informasi terkait pengaruh variabel makroekonomi terhadap pengangguran yang datanya diolah oleh lembaga terkait tersebut.

3. Bagi dunia akademisi

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan studi mengenai makroekonomi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan yang akan diteliti, yaitu:

1. Ruang Lingkup Materi

Ada dua variabel yang menjadi fokus kegiatan dalam penelitian ini, yaitu variabel makroekonomi (variabel X atau variabel independen) dan pengangguran (variabel Y atau variabel dependen) agar variabel yang menjadi fokus tersebut tidak meluas, maka perlu adanya batasan terhadap materi yang akan diteliti.

- a. Variabel Makroekonomi

Variabel makroekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini memiliki 3 sub-variabel, yakni berupa indeks pembangunan manusia (X_1), upah minimum kabupaten/kota (X_2), dan pertumbuhan ekonomi (X_3) yang dinilai sudah

mewakiliikan variabel makroekonomi yang lainnya. Terdapat rincian sebagai berikut:

1) Indeks Pembangunan Manusia (X_1)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yakni mencakup umur panjang dan hidup sehat (kesehatan), pengetahuan (pendidikan), dan standar hidup layak (pengeluaran). Dalam mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup, selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator angka harapan lama sekolah, adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita.⁹

2) Upah Minimum Kabupaten/Kota (X_2)

Indikator yang digunakan dalam menetapkan upah minimum adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL).¹⁰ Kebutuhan Hidup Layak yang adalah standar dasar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan.

3) Pertumbuhan ekonomi (X_3)

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).¹¹

⁹ Dwi Mahroji dan Iin Nurkhasanah, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten" *Jurnal Ilmu Ekonomi*, No. 1 Vol. 9 (April, 2019), hlm. 56.

¹⁰ Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 88 Ayat 4.

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, *Produk Domestik Regional Bruto Pamekasan Menurut Lapangan Usaha 2012-2016* (BPS Pamekasan: Pamekasan, 2017) <https://pamekasankab.bps.go.id/publication.html> diakses pada tanggal 02 November 2019.

b. Pengangguran

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).¹²Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum memulai bekerja terhadap jumlah angkatan kerja.¹³

2. Lokasi

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 kabupaten/kota, yakni 29 kabupaten dan 9 kota.

F. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian adalah anggapan dasar atau postulat tentang suatu hal yang berkenaan dengan masalah penelitian yang sebenarnya sudah diterima oleh peneliti.¹⁴Asumsi penelitian yang diajukan oleh peneliti dengan skripsi yang berjudul “Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2018” sebagai berikut:

1. Adanya pembangunan dan pengembangan modal manusia (*human capital*) akan meningkatkan produktivitas manusia.¹⁵
2. Penetapan upah minimum akan memberikan dampak pada permintaan dan penawaran tenaga kerja.¹⁶

¹²Dwi Mahroji dan Iin Nurkhasanah, “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten” *Jurnal Ilmu Ekonom*, No. 1 Vol. 9 (April, 2019), hlm. 52.

¹³Badan Pusat Statistik Jawa Timur. *Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2017* (Surabaya: BPS Jawa Timur, 2017) <https://jatimprov.bps.go.id/publication.html> diakses pada tanggal 02 November 2019.

¹⁴Tim STAIN Pamekasan, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2012), hlm. 10.

¹⁵ Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Jakarta, Erlangga, 2003), hlm.

3. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber alamnya, sumber daya manusia, modal, usaha, teknologi, dan sebagainya.¹⁷

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.¹⁸ Hipotesis adalah jawaban terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling tinggi dan paling mungkin kebenarannya.

Menurut Suharsimi Arikunto, terdapat dua jenis hipotesis yaitu hipotesis kerja atau disebut dengan hipotesis alternatif dan hipotesis nol sering disebut juga hipotesis statistik.¹⁹ Hipotesis alternatif (H_a) menyatakan adanya pengaruh antara variabel X dan Y atau adanya perbedaan antara dua kelompok. Hipotesis nol (H_0) menyatakan tidak adanya perbedaan antara dua variabel atau tidak adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sehingga hipotesis merupakan suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut.²⁰ Hipotesis penelitian ini adalah:

1. a. H_{a1} : Ada pengaruh yang signifikan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018.

¹⁶ Suparmoko, *Pengantar Ekonomi Makro* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2000), hlm. 73.

¹⁷M. L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 106.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 110.

¹⁹ Ibid. 112-113.

²⁰ Iqbal Hasan, *Analisis Data Dengan Penelitian Statistik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 31.

- b. Ha₂: Ada pengaruh yang signifikan antara UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) terhadap pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018.
 - c. Ha₃: Ada pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018.
2. Ha₄: Ada pengaruh yang signifikan antara variabel makroekonomi terhadap pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018 secara simultan.

H. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang perlu didefinisikan agar pembaca memahami makna istilah yang digunakan dalam penelitian ini, guna memperoleh persepsi dan pemahaman yang sama dengan penulis. Terdapat beberapa istilah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Variabel makroekonomi adalah suatu variabel tentang ekonomi yang membahasnya secara keseluruhan. Berikut definisi istilah 3 sub-variabel makro ekonomi:
 - a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu angka yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh seseorang.
 - b. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah sebuah kebijakan tentang upah yang diterapkan oleh pemerintah untuk menjamin kesejahteraan para buruh dan pekerja.

- c. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat.
2. Pengangguran disebut juga orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, akan tetapi sedang aktif mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha.

Dari definisi tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa judul proposal penelitian “Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2018” adalah sebuah usaha untuk mengetahui pengaruh dari variabel makroekonomi yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Timur.